

PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

2019

<https://jakarta.bps.go.id>



PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

2019

<https://jakarta.bps.go.id>



PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA 2019

NOMOR ISBN	: 978-602-0922-34-8
NOMOR PUBLIKASI	: 31520.1909
KATALOG BPS	: 4301003.31
Ukuran Buku	: 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: x + 39 Halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Editor	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Gambar Kulit	: Bidang IPDS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Pencetak	: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Buyung Airlangga, M.Bus

Editor : 1. Suryana, S.ST, M.Si
2. Rini Savitridina, MA

Penulis : Mega Cahya Kristianti, SST

Pengolah Data : Mega Cahya Kristianti, SST

Pembuat Cover : Ranita Rizki Aprillia, SST

<https://jakarta.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya sehingga buku “Profil Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019” ini dapat disusun. Buku ini merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan informasi mengenai kondisi pendidikan di DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Informasi yang ditampilkan antara lain partisipasi sekolah, melek huruf, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan angka putus sekolah. Juga ditampilkan gambaran sarana dan prasarana pendidikan serta program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Bidang Pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat untuk kita semuanya.

Jakarta, 28 November 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta,



BUYUNG AIRLANGGA

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	vii	
Daftar Tabel	ix	
Daftar Gambar	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	METODOLOGI	
	2.1. Sumber Data	4
	2.2 Konsep dan Definisi	4
BAB III	INDIKATOR PROSES	
	3.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan	8
	3.2 Partisipasi Pendidikan.....	10
	3.3 Pendidikan Anak Usia Dini	12
	3.4 Partisipasi Sekolah.....	15
	3.5 Angka Partisipasi Sekolah	17
	3.6 Angka Partisipasi Kasar.....	19
	3.7 Angka Partisipasi Murni	21
BAB IV	INDIKATOR OUTPUT	
	4.1. Buta Huruf	23
	4.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan...	29
BAB V	KARTU JAKARTA PINTAR SEBAGAI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA	
	5.1 Pengertian Kartu Jakarta Pintar.....	31
	5.2 Besaran Dana Yang Diterima.....	32
	5.3 Perkembangan Penerima Kartu Jakarta Pintar.....	33
BAB VI	PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA	41	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Sekolah, Guru, Murid Menurut Jenis Sekolah di Provinsi DKI Jakarta, 2017/2018	9
Tabel 2	Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2017/2018	10
Tabel 3	Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017	11
Tabel 4	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi DKI Jakarta, 2018	11
Tabel 5	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018	17
Tabel 6	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di DKI Jakarta, 2018	19
Tabel 7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018	20
Tabel 8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Kuintil Serta Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta, 2018	22
Tabel 9	Angka Partisipasi Murni (APM) formal dan non formal (Paket A/B/C) menurut jenjang pendidikan di DKI Jakarta, 2018	23
Tabel 10	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018	23
Tabel 11	Besarnya Dana Biaya Operasional Pendidikan Untuk Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, di DKI Jakarta (Rupiah)	34

Tabel 12	Perkembangan Penerima Kartu Jakarta Pintar Menurut Status Sekolah di DKI Jakarta, 2014-2016	35
Tabel 13	Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di DKI Jakarta, 2016	36

<https://jakarta.bps.go.id>

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1	Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2018	14
Gambar 2	Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2018	15
Gambar 3	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018	27
Gambar 4	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota Administrasi dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2018	28
Gambar 5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2018	28
Gambar 6	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia dari berbagai tingkat usia dan golongan yang meliputi: kemampuan kepribadian dan moralitas, kemampuan intelektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, kemampuan jasmani dan kemampuan-kemampuan lainnya. Fungsi pendidikan nasional Indonesia adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreatifitas dan kecerdasan anak sejak dini. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari tingkat pendidikan yang diterapkan di negara tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, dengan makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada di DKI Jakarta melalui berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan. Selain menjalankan program pendidikan yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan berbagai program yang menjadi andalan pemerintah daerah dengan harapan kualitas sumber daya manusia di DKI Jakarta semakin meningkat. Program pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP plus merupakan bagian dari program pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah DKI Jakarta, disamping program yang dilaksanakan secara nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.

Secara umum untuk memantau perkembangan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas antara lain, kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka Partisipasi untuk PAUD, Angka Melek Huruf (AMH) dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Publikasi ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran kondisi pendidikan di DKI Jakarta.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan Profil Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2018, antara lain :

1. Untuk mengetahui indikator proses pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 yang diwakili oleh data sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru, sekolah dan murid.
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang diwakili dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan.
3. Untuk memberikan gambaran program bantuan pendidikan di DKI Jakarta berupa Kartu Jakarta Pintar.

1.3 Sistematika Penulisan

Pembahasan dijabarkan kedalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II metodologi, berisi tentang sumber data dan konsep/definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi.

Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang ada di DKI Jakarta yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan menengah.

Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan pendidikan yang tercermin dari indikator angka melek huruf dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selain itu indikator angka putus sekolah juga disajikan untuk melihat adanya hambatan/kegagalan pembangunan pendidikan.

Bab V pembahasan mengenai program bantuan pendidikan di DKI Jakarta berupa Kartu Jakarta Pintar.

Bab VI penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan penduduk DKI Jakarta secara umum.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret tahun 2018. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan yang disajikan dalam publikasi Profil Pendidikan ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan di DKI Jakarta pada tahun 2018.

2.2 Konsep dan Definisi

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini :

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah

pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan pra sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, contoh: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA).

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- **Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;

- **Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

Tidak dapat membaca dan menulis, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.

3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

BAB III
INDIKATOR PROSES

3.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggaraan pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di DKI Jakarta akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid dan guru.

**Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru, Murid Menurut Jenis Sekolah
di Provinsi DKI Jakarta, 2017/2018**

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-Kanak dan RA	3.303	4.197	44.251
Sekolah Dasar dan MI	2.953	44.073	933.628
Sekolah Menengah Pertama dan MTs	1.315	23.021	421.915
Sekolah Menengah Umum dan MA	582	12.785	191.372
Sekolah Menengah Kejuruan	579	10.292	219.301
Jumlah	8.732	94.368	1.810.467

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam Jakarta Dalam Angka 2017/2018

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017/2018 Provinsi DKI Jakarta mempunyai jumlah sekolah sebanyak 8.732 sekolah, yang terdiri dari TK dan RA, SD dan MI, SMP dan MTs, SMU, MA dan SMK dengan jumlah seluruh guru sebanyak 94.368 guru, dan 1.810.467 murid. Jumlah terbanyak baik jumlah guru, maupun murid berada di tingkat SD, selanjutnya di tingkat SMP maupun SMA.

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan juga dapat dilihat dari nilai rasio murid-kelas, yang mencerminkan idealnya jumlah murid dalam satu kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standard ideal rasio murid-kelas secara umum adalah 1 : 28 untuk SD, 1:32 untuk SMP dan 1:32 untuk SMA/SMK (BPS, 2016). Karena keterbatasan data dalam publikasi ini tidak ditampilkan jumlah dan rasio guru, murid, dan ruang kelas menurut jenjang pendidikan pada kelompok sekolah SD, SMP, dan SMA. Hanya dapat ditampilkan data serupa pada jenjang pendidikan sekolah berbasis agama yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Tabel 2. Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah			Rasio		
	Guru	Murid	Kelas	Murid Guru	Kelas Guru	Murid Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ibtidaiyah	5 965	115 945	3 422	19,44	0,57	33,88
Tsanawiyah	4 519	58 377	1 364	12,91	0,30	42,79
Aliyah	1 730	20 415	644	11,80	0,37	31,70

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam Jakarta Dalam Angka 2017/2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017/2018 rasio murid kelas pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebesar 33,88, sedikit lebih besar dibandingkan dengan kondisi ideal yang sebesar 28 murid per kelas. Sementara itu rasio murid kelas pada jenjang

pendidikan Madrasah Tsanawiyah sangat tinggi mencapai 42,79, jauh diatas kondisi ideal yang sebesar 32 murid per kelas. Rasio murid kelas pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah mencapai 31,70 dapat dikatakan ideal karena mendekati kondisi ideal sebesar 32 murid per kelas. Jumlah murid dalam satu kelas yang terlampau banyak dapat berakibat pada suasana belajar mengajar yang tidak nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya kurang optimal.

Data rasio murid guru untuk tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah mencapai 19,44 menunjukkan bahwa setiap guru harus mengajar sebanyak 19 orang murid. Pada tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah rasio murid guru lebih kecil, yaitu masing-masing sebesar 12,91 dan 11,80. Rasio kelas guru untuk jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebesar 0,57, dan Madrasah Tsanawiyah serta Aliyah masing-masing sebesar 0,30 dan 0,37.

3.2 Partisipasi Pendidikan

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, wajib belajar yang dulunya 9 tahun berubah menjadi wajib belajar 12 tahun, mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan salah satu syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah dasar adalah cukup umur minimal 6 tahun dan membawa serifikasi/ijazah sekolah TK. Hal ini jelas menunjukan bahwa negara Indonesia sangat mengutamakan pendidikan masyarakatnya, yang tentunya untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan perbaikan negara Indonesia yang lebih baik.

Pada tabel 3 ditampilkan angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pada Tabel 4 menggambarkan kondisi riil di Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang sama.

Tabel 3. Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Target APK (%)
(1)	(2)
SD/SDLB/Paket A	97,31
SMP/SMPLB/Paket B	74,29
SMA/SMLB/SMK/Paket C	75,50

Sumber :Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Apabila dilihat dengan hasil yang dicapai di Provinsi DKI Jakarta melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas 2018 (Tabel 4), tampak bahwa capaian APK di DKI Jakarta pada tahun 2017 sudah melampaui target yang ditetapkan dalam renstra nasional dan target kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi DKI Jakarta, 2018

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar dan sederajat	105,27	98,03
Sekolah Menengah Pertama dan sederajat	94,91	80,81
Sekolah Menengah Atas dan sederajat	73,98	60,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Disisi lain, indikator partisipasi sekolah dapat digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifitas suatu program. Hasil Susenas 2018 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.

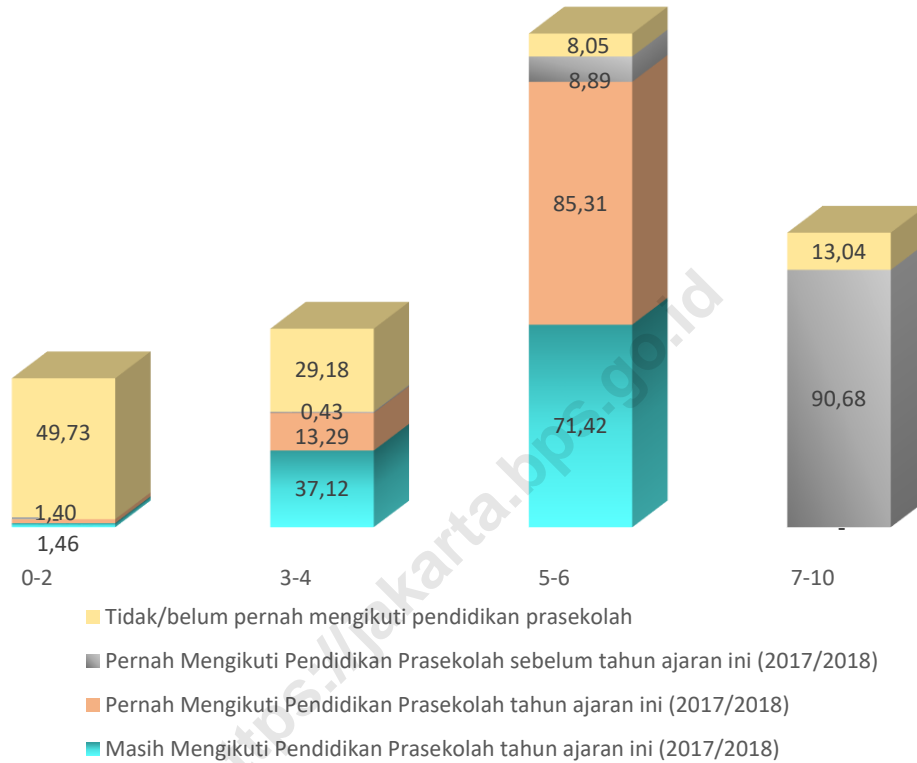
3.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia enam tahun. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 28 menyebutkan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini memiliki banyak manfaat antara lain bisa membentuk jiwa pembelajar sejati sejak dini, mampu bersosialisasi sejak dini, mampu bekerja sama sejak dini, bisa melatih konsentrasi sejak dini, mampu melatih kesabaran sejak dini, dan mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini.

Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50%, dan kapasitas kecerdasan itu mencapai 80% di usia 8 tahun. Berdasarkan pengetahuan ini pun makin banyak didengungkan mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini. Tetapi, tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini tidak begitu penting, dengan alasan tidak ingin anaknya mengalami stres atau kehilangan masa bermain. Padahal hampir 70 persen pembentukan karakter manusia itu dimulai dari usia nol hingga 5 tahun.

Gambar 1. Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2017/2018

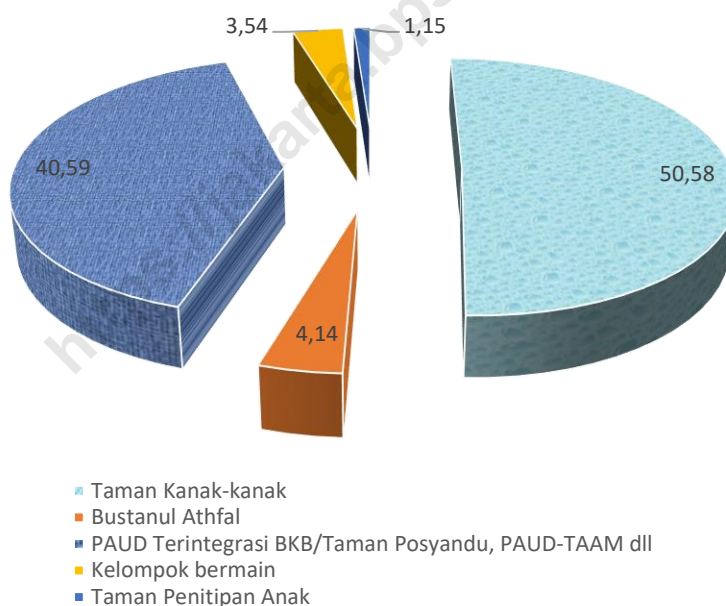


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 didapat bahwa penduduk yang berumur 0-10 tahun yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2017/2018 paling banyak berada pada kelompok umur 5-6 tahun sebesar 71,42. Apabila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, jumlah penduduk umur 5-6 tahun yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah penduduk umur 5-6 tahun yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah sebesar 85,31 persen, dan pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2017/2018 bahkan hanya sebesar 8,89 persen. Ini adalah pertanda yang sangat baik yang menunjukkan peningkatan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak pra sekolah bagi perkembangan anak.

Gambar 1 di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018 masih adanya anak pada kelompok umur 0-10 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah. Sebanyak 29,18 persen anak umur 3-4 tahun tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah, dan sebanyak 8,05 persen anak umur 5-6 tahun tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah. Semestinya anak umur 3-4 tahun sudah dapat mengikuti pendidikan pra sekolah di PAUD atau Taman Kanak-Kanak untuk belajar dan bermain bersama teman-temannya, begitu pula dengan anak 5-6 tahun alangkah baiknya jika orangtua sudah mengikutkan anaknya di pendidikan pra sekolah.

Gambar 2. Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Prasekolah, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (TK/RA/ sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra sekolah.

Pada tahun 2018, presentase anak usia 0-10 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak dan Bustanul Athfal sebesar 54,72 persen, yang pernah/sedang mengikuti pendidikan di PAUD sebesar 40,59 persen, di jenjang kelompok bermain sebesar 3,54 persen, dan 1,15 persen di penitipan anak (Gambar 2).

3.4 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk peningkatan sumber daya manusia. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 1,14 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 17,34 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 81,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan sebesar 1,14 persen.

Menurut wilayah tempat tinggal, presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah tertinggi ada di Kepulauan Seribu yakni sebesar 2,26 persen lebih tinggi daripada Kota Administrasi lainnya dan juga lebih tinggi dibanding angka DKI Jakarta 1,14 persen. Hal ini disebabkan akses pendidikan di Kepulauan Seribu belum lengkap dan belum memadai dibandingkan wilayah lainnya. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah terendah ada di Jakarta Selatan yakni sebesar 0,74 persen.

Tabel 5. Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018

Status Pendidikan	Kab/Kota Administratif						DKI Jakarta
	Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki							
Tidak/belum pernah bersekolah	2,06	0,51	0,78	0,43	0,80	1,43	0,81
Masih bersekolah	23,10	17,36	19,64	16,55	16,57	17,00	17,68
SD Sederajat	5,63	5,53	6,42	5,34	5,55	6,26	5,89
SMP Sederajat	10,01	4,92	4,41	5,63	5,39	4,61	4,92
SMA Sederajat	6,75	3,77	4,05	2,56	3,42	3,72	3,65
Di-Universitas	0,71	3,14	4,74	3,03	2,21	2,41	3,22
Tidak bersekolah lagi	74,84	82,13	79,59	83,02	82,63	81,57	81,52
Jumlah	100,00	100,00	100,84	100,00	100,00	100,00	100,00
Perempuan							
Tidak/belum pernah bersekolah	2,47	0,96	1,21	1,51	1,63	2,33	1,48
Masih bersekolah	20,26	16,64	18,28	14,40	16,85	16,93	17,00
SD Sederajat	7,43	5,62	6,24	5,83	4,73	5,05	5,50
SMP Sederajat	7,27	3,73	3,69	3,56	5,53	4,74	4,33
SMA Sederajat	4,96	3,73	4,46	2,29	4,05	3,81	3,90
Di-Universitas	0,60	3,56	3,89	2,71	2,53	3,33	3,28
Tidak bersekolah lagi	77,28	82,40	80,51	84,10	81,52	80,74	81,52
Jumlah	100,00	100,00	99,41	100,00	100,00	100,00	100,00
Laki-Laki+Perempuan							
Tidak/belum pernah bersekolah	2,26	0,74	0,99	0,97	1,21	1,89	1,14
Masih bersekolah	21,68	17,00	18,96	15,46	16,71	16,96	17,34
SD Sederajat	6,53	5,60	6,37	5,59	5,19	5,65	5,72
SMP Sederajat	8,93	4,30	4,02	4,58	5,41	4,73	4,60
SMA Sederajat	5,56	3,79	4,29	2,46	3,76	3,71	3,79
Di-Universitas	0,66	3,31	4,29	2,84	2,34	2,88	3,22
Tidak bersekolah lagi	76,06	82,27	80,05	83,56	82,08	81,15	81,52
Jumlah	100,00	100,00	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan. Tabel 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan presentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah 1,48 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 0,81 persen. Ini mengindikasikan bahwa ada ketimpangan dalam akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Kesenjangan terhadap akses pendidikan antar jenis kelamin terlihat jelas terjadi di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu, presentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 2,47 persen relatif tinggi dibandingkan dengan di wilayah Jakarta lainnya.

3.5 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Tabel 6 memperlihatkan data APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Berdasarkan kelompok umurnya, APS pada kelompok umur 7-12 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok umur lanjutan (kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun). Sejalan dengan itu semakin tinggi pendidikan semakin rendah partisipasinya. Perlu diperhatikan apabila dilihat menurut jenis kelamin, APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan APS perempuan.

Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Karakteristik Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran serta Kelompok Umur di DKI Jakarta, 2018

Karakteristik	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,93	97,79	72,73
Perempuan	99,59	97,75	70,88
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	99,81	97,65	71,40
40 Persen Tengah	99,74	97,80	68,47
20 Persen Teratas	99,66	98,05	78,42
DKI JAKARTA	99,77	97,77	71,81

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Pada tabel 6 terlihat bahwa semakin meningkat kelompok umur maka nilai APS nya semakin menurun. APS di kelompok umur 7-12 lebih tinggi dibanding dengan kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun, dan nilainya semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok umur. Jika dilihat nilai APS menurut kelompok umur dan kelompok pengeluaran, maka dapat disimpulkan bahwa di kelompok umur 13-15 APS akan meningkat seiring dengan pengeluaran, terlihat bahwa APS di umur tersebut lebih tinggi di kelompok pengeluaran 20 persen teratas dibandingkan dengan 40 persen tengah dan 40 persen terbawah. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga rendah, sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 97,65 persen, 97,80 persen, dan 98,05 persen. Sedangkan sebaliknya untuk kelompok umur 7-12 tahun, APS akan menurun sesuai dengan kelompok pengeluaran rumah tangga. APS dari kelompok pengeluaran rendah, sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 99,81 persen, 99,74 persen dan 99,66 persen.

3.6 Angka Partisipasi Kasar

APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang bersekolah lewat dari umur yang dianjurkan, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	116,17	97,94	89,60
Jakarta Selatan	104,52	94,84	72,37
Jakarta Timur	105,75	98,91	80,31
Jakarta Pusat	106,26	101,31	56,36
Jakarta Barat	104,42	95,89	70,58
Jakarta Utara	105,89	85,80	78,28
DKI Jakarta	105,27	94,91	73,98

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Pada Tabel 7 di atas terlihat APK untuk SD secara keseluruhan, baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta maupun di enam wilayah DKI Jakarta, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini

menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas. Nilai APK SD di Provinsi DKI Jakarta sebesar 105,27. Kabupaten/kota yang memiliki nilai APK tertinggi yakni di Kepulauan Seribu dengan nilai APK sebesar 116,17, dan APK terendah ada di wilayah Jakarta Barat dengan nilai 104,42. Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di Kepulauan Seribu yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar dibanding Jakarta Barat. Ini menunjukkan sistem pendidikan SD/ sederajat di perkotaan lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP yang memiliki nilai lebih dari 100 persen yaitu di Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa murid SMP selain mencakup anak yang berusia 13-15 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 13 tahun dan juga lebih 15 tahun. Kenyataan ini menunjukkan karena banyak anak yang belum cukup umur sudah mulai bersekolah di jenjang pendidikan SD sehingga berdampak pada umurnya ketika masuk SMP, atau bisa jadi APK lebih dari 100 persen ini karena masih ada murid SMP yang tinggal kelas. Angka APK jenjang pendidikan SMA di Provinsi DKI Jakarta sebesar 73,98. Nilai APK di semua wilayah seluruhnya kurang dari 100 persen.

Tabel 8 menunjukkan bahwa, APK menurut jenis kelamin memperlihatkan perbedaan. Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, APK laki-laki (104,62%) lebih kecil dari pada APK perempuan (105,95%). Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, APK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. APK SMP/ sederajat perempuan sebesar 92,42 persen, laki-laki sebesar 97,21 persen, sementara untuk APK SMA/ sederajat, APK perempuan lebih besar daripada APK laki-laki dengan nilai masing-masing 76,52 persen dan 71,49 persen.

Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Karakteristik Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran serta Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta, 2018

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	104,62	97,21	71,49
Perempuan	105,95	92,42	76,52
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	105,28	100,94	68,28
40 Persen Tengah	104,76	87,47	78,12
20 Persen Teratas	106,55	94,89	79,77
DKI Jakarta	105,27	94,91	73,98

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

3.7 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Secara umum, angka APM di enam Kab/Kota di DKI Jakarta menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda, APM untuk pendidikan SD termasuk paket A di wilayah Kabupaten

Kepulauan Seribu menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding wilayah lainnya, APM untuk pendidikan SMP termasuk paket B di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara memiliki nilai APM terendah, sedangkan untuk APM SMA termasuk paket C, Kepulauan Seribu justru memiliki tingkat APM yang lebih tinggi di banding wilayah lainnya (Tabel 9).

Tabel 9 . Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kab/Kota di DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	APM SD	APM SMP	APM SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	92,02	77,57	70,53
Jakarta Selatan	98,33	80,30	60,49
Jakarta Timur	98,56	83,79	66,79
Jakarta Pusat	94,95	80,34	54,63
Jakarta Barat	98,47	83,24	56,71
Jakarta Utara	97,68	74,39	54,96
DKI Jakarta	98,03	80,81	60,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi), Maret 2018

Tabel 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran serta Jenjang Pendidikan, 2018

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98,47	82,83	59,10
Perempuan	97,56	78,63	60,94
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	98,37	86,38	60,59
40 Persen Tengah	98,74	76,91	56,87
20 Persen Teratas	94,76	73,64	64,06
DKI JAKARTA	98,03	80,81	60,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi), Maret 2018

Berdasarkan jenis kelamin, tampak perbedaan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. APM laki-laki lebih besar daripada APM perempuan pada jenjang pendidikan SD, dan SMP kecuali untuk jenjang pendidikan SMA. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender di bidang pendidikan khususnya di DKI Jakarta masih terasa, laki-laki diberi kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Tabel 10).

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB IV

INDIKATOR OUTPUT

Pengembangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi. Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, dampak positif dari program wajib belajar telah mampu mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Pada tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya siswa SMA sederajat mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kebijakan ini diimplementasikan dengan kebijakan SPP gratis pada SMA sederajat negeri, bahkan di seluruh sekolah.

Kebijakan ini berimplikasi pada semakin banyak penduduk yang mampu menamatkan pendidikan SD, dan secara tidak langsung turut memberi kontribusi pada penundaan usia anak-anak dalam memasuki bursa lapangan pekerjaan. Melalui program ini diharapkan jumlah penduduk usia sekolah yang buta huruf semakin berkurang. Akhirnya, melalui pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

4.1 Buta Huruf

Tingkat buta huruf adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis terhadap jumlah seluruh penduduk. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki setiap individu. Berkaitan dengan ini, pemerintah

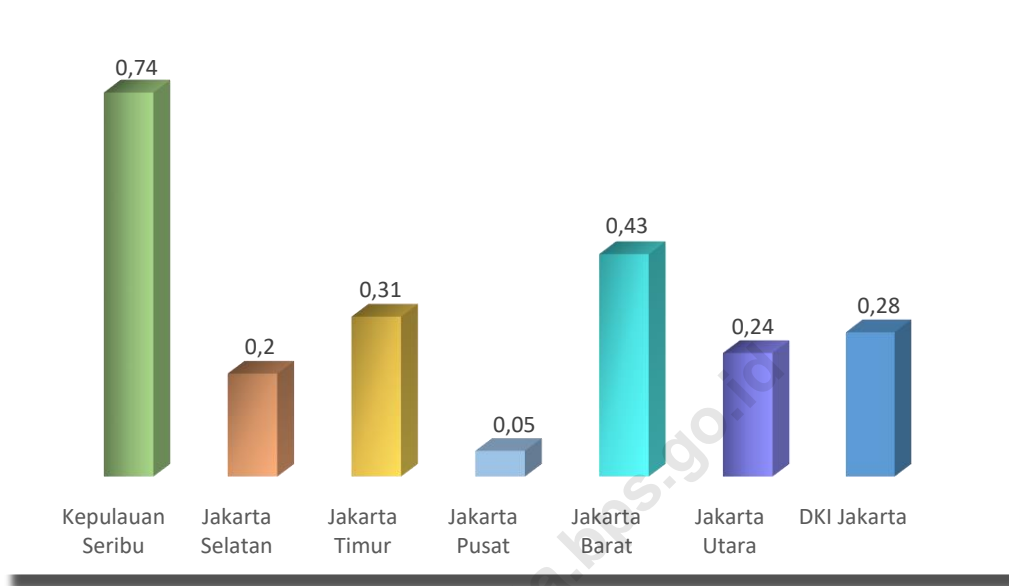
berusaha agar seluruh penduduk bebas buta aksara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan buta aksara di Indonesia antara lain: tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya kondisi geografis Indonesia, munculnya penyandang buta aksara baru, dan pengaruhnya faktor sosiologis dan sosial masyarakat.

Angka buta huruf usia 10 tahun ke atas dapat menjadi indikator keberhasilan bidang pendidikan secara umum. Angka ini tidak mempunyai batas atas usia penduduk, dengan demikian penduduk usia tua juga terhitung angka buta hurufnya, sehingga mungkin ada pengaruh buta huruf dari penduduk pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas).

Sepanjang tahun 2016-2018, secara umum tingkat buta huruf penduduk usia 15+, 15-44, dan 45+ di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka buta huruf penduduk DKI Jakarta pada usia 15+ sebesar 0,36 persen. Angka ini turun menjadi 0,33 persen pada tahun 2017, dan turun lagi menjadi 0,28 persen pada tahun 2018. Penurunan angka buta huruf ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dengan angka buta huruf usia 15-44 tahun, tahun 2016 angka buta huruf di kelompok usia ini sebesar 0,08 persen, kemudian menurun menjadi 0,06 persen tahun 2017, tetapi naik sedikit di tahun 2018 menjadi sebesar 0,07 persen. Angka buta huruf usia 45+ juga mengalami penurunan dari 0,99 persen tahun 2016, menjadi 0,92 persen tahun 2017 dan menjadi 0,73 persen tahun 2018.

Terdapat tiga wilayah dengan angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki angka yang paling tinggi yakni di Kepulauan Seribu dengan angka buta huruf sebesar 0,74 persen, dilanjutkan dengan Jakarta Barat sebesar 0,43 persen dan Jakarta Timur sebesar 0,31 persen. Sedangkan tiga wilayah lainnya dengan angka buta huruf yang relatif lebih rendah dibanding 3 wilayah di atas, yakni Jakarta Selatan dengan angka buta huruf sebesar 0,2 persen, Jakarta Utara sebesar 0,24 persen dan Jakarta Pusat dengan angka buta huruf sebesar 0,05 persen.

Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Kab/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018



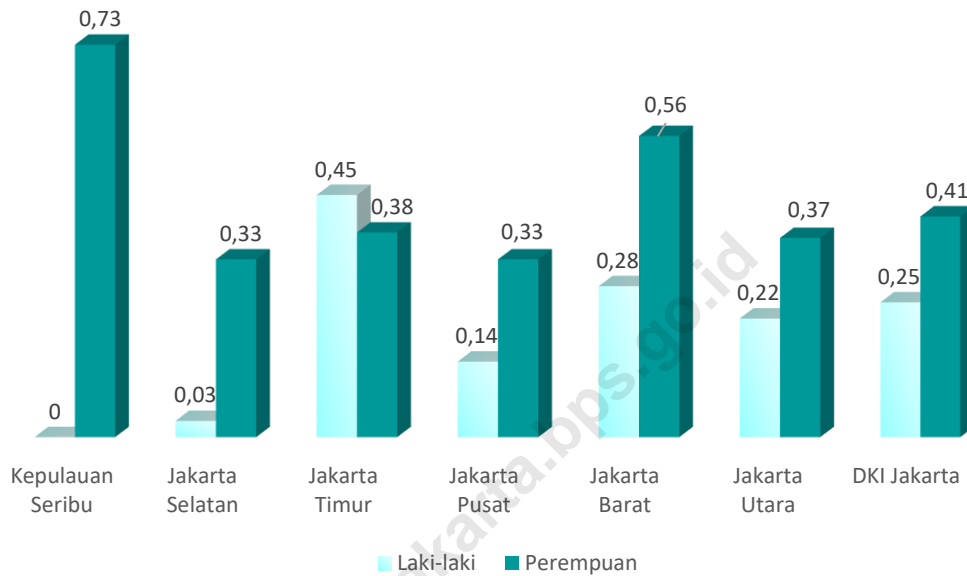
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Pada tahun 2018 angka buta huruf (ABH) tertinggi terdapat di Kepulauan Seribu, yakni sebesar 0,74 persen. Sementara angka buta huruf terendah terdapat di Jakarta Pusat, yaitu sebesar 0,05 persen. Namun demikian secara keseluruhan ABH di seluruh wilayah kabupaten/kota kurang dari 1 persen. Artinya posisi ini sudah dikategorikan *hard rock* sulit untuk diturunkan, dan cenderung berfluktuatif di sekitar angka tersebut. Kenaikan dan penurunan angka buta huruf yang terjadi lebih dipengaruhi oleh migrasi. Misalnya masuknya pendatang yang berpendidikan rendah seperti pramuwisma, pekerja informal, dan lain-lainnya atau bisa jadi daerah tersebut belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, atau pendatang yang berpendidikan tinggi seperti tenaga terampil dari daerah lain atau bahkan dari negara lain

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat buta huruf penduduk perempuan di provinsi DKI Jakarta usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan angka buta huruf penduduk laki-laki ditahun yang sama, masing-masing sebesar 0,41 persen dan 0,25 persen. Begitu pula di tahun 2018, angka buta huruf perempuan juga lebih besar

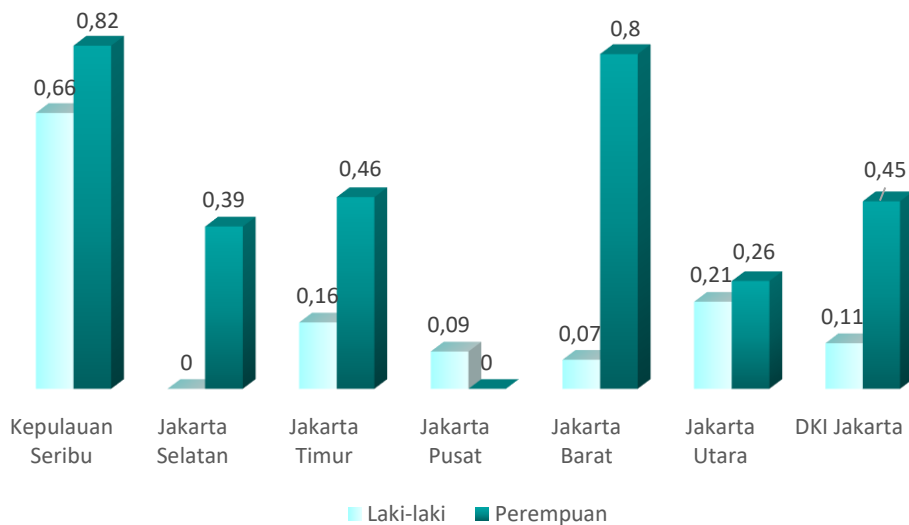
dibandingkan dengan laki-laki, yakni sebesar 0,45 persen, sedangkan angka buta huruf laki-laki sebesar 0,11 persen.

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2017

Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Sebagian masih ditemui perbedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan yang buta huruf di masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah (*grass root*). Hal ini dapat dipahami, dalam kondisi ekonomi yang terbatas, masih banyak keluarga yang memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-lakinya, karena mereka dianggap akan menjadi tulang punggung keluarga. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan sekarang ini lebih menekankan pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan formal.

Sejalan dengan target pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS), kelompok umur garapan penuntasan angka buta aksara dinaikkan menjadi 15-59 tahun (Pusdatin, 2014). Pada tahun 2016 angka buta huruf penduduk DKI Jakarta pada usia 15+ sebesar 0,36 persen. Angka ini turun menjadi 0,33 persen pada tahun 2017, dan turun lagi menjadi 0,28 persen pada tahun 2018 (Sumber: Susenas Maret 2016-2018). Dari angka-angka tersebut, dapat diartikan secara keseluruhan program pengentasan buta huruf di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah berhasil, ini ditunjukkan dari penurunan angka buta huruf di seluruh kelompok umur, termasuk kelompok umur tua.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat buta huruf penduduk perempuan usia 10-44 tahun pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan angka buta huruf penduduk laki-laki walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan, masing-masing sebesar 0,14 persen dan 0,10 persen. Begitu pula pada kelompok umur 15-59 tahun, angka buta huruf perempuan sebesar 0,55 persen, sedangkan angka buta huruf laki-laki sebesar 0,22 persen. Dari data tersebut, terlihat disparitas gender pada pada kelompok umur 15-59 tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur 10-44 tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh angka buta huruf kelompok usia 45 – 59 tahun yang relatif masih tinggi dibandingkan angka buta huruf kelompok umur yang lebih muda. Pada kelompok ini bahkan terlihat disparitas gendernya sangat tinggi, dimana angka buta huruf perempuan usia 45-59 tahun sebesar 1,77 persen, sementara pada laki-lakinya hanya 0,57 persen.

Penambahan target sasaran pendidikan keaksaraan oleh Pemerintah, dari kelompok usia 10-44 tahun menjadi 15-59 tahun, dikarenakan angka buta huruf di usia 45-59 tahun

relatif masih tinggi, sehingga mempengaruhi angka buta huruf secara umum. Angka buta huruf pada kelompok usia 45-59 tahun masih relatif tinggi dibandingkan pada kelompok usia di bawahnya. Angka buta huruf dibawah usia 45 tahun kurang dari 1 persen. Diharapkan dengan target sasaran penuntasan angka buta huruf penduduk hingga umur 59 tahun, penurunan angka buta huruf secara keseluruhan menjadi lebih mudah.

Secara umum perubahan angka buta huruf yang terjadi dari tahun ke tahun pada kelompok umur 45-59 tahun, umumnya disebabkan oleh migrasi internal yang terjadi pada penduduk wanita, misalnya pembantu rumah tangga yang berasal dari luar Jakarta yang tidak berpendidikan dan tidak bisa baca tulis bermigrasi ke kota Jakarta, sehingga menyebabkan angka buta huruf perempuan cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki.

Jika diamati pada masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin, terlihat disparitas angka buta huruf menurut jenis kelamin pada kelompok usia tua lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya masa lalu, umumnya lebih mendahulukan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (budaya *patriarkhi*), namun dari tahun ke tahun tampaknya budaya ini sudah mulai terkikis. Penurunan angka buta huruf selama satu dekade pada seluruh wilayah ini diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan dalam upaya menurunkan tingkat keniraksaraan hingga separuhnya pada tahun 2016 sesuai dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang sekarang sudah beralih menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tindak lanjut Kerangka aksi Dakar "Pendidikan Untuk Semua" (PUS), dimana salah satu tujuannya adalah "mencapai perbaikan 50 persen pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2016, terutama bagi kaum perempuan" (Depdiknas, 2004). Salah satu hal yang turut berperan meningkatkan kemampuan baca tulis tersebut adalah dilaksanakannya program pendidikan non formal dengan diberlakukannya program Paket A, Paket B, SLTP Terbuka, dan program penuntasan keniksaraan lainnya. Partisipasi program wajib belajar paket A, pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga percepatan penurunan jumlah perempuan yang buta aksara lebih cepat dibandingkan pada laki-laki (Depdiknas, 2004).

Kondisi ini sangat menggembirakan, karena menurunnya angka buta aksara pada perempuan akan berdampak pada bertambahnya peluang perempuan dalam menyerap dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan mempengaruhi kualitas SDM perempuan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan perempuan itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Jika ia berperan sebagai ibu, maka akan berpengaruh pada pola pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya. Secara bertahap kondisi ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan kualitas generasi penerus.

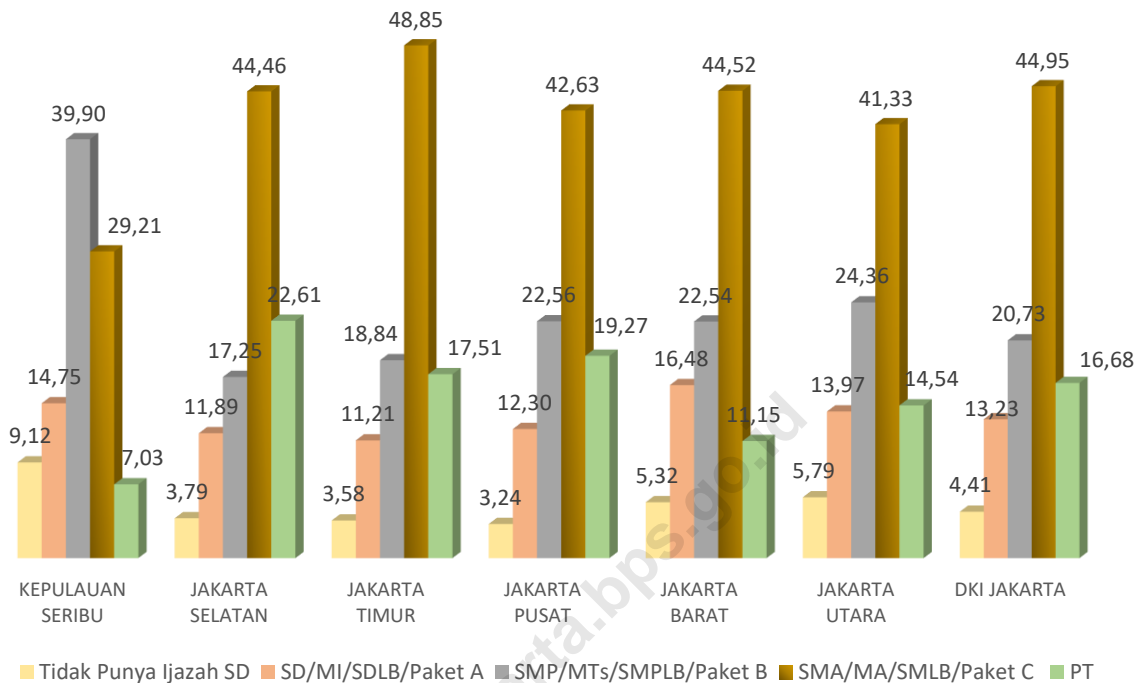
Pemerintah telah bertekad untuk menangani masalah penduduk buta aksara secara tuntas. Jumlah buta aksara masih potensial untuk meningkat sebagai eksekusi masalah-masalah sosial-ekonomi yang berakibat pada putus sekolah anak-anak kelas 1-3 SD/MI/ sederajat. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti pemberian “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS), “Bantuan Operasional Pendidikan” (BOP), Beasiswa untuk siswa miskin (BSM), dan program bantuan lainnya ditujukan untuk menekan angka putus sekolah, yang akhirnya akan berdampak pada penurunan angka buta huruf secara umum.

Pada Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo yang dilanjutkan oleh Gubernur penerus Basuki Tjahaya Purnama (2012-2017), digulirkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan membantu siswa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti membeli buku, pakaian seragam, dan uang saku/transport. Program ini diharapkan memacu para siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Pada akhirnya kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Terkait Kartu Jakarta Pintar akan dibahas lebih lanjut pada Bab V.

4.2 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambar 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2018

Dari gambar 6 di atas terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/ sederajat sebesar 44,95 persen, diikuti tamat SMP/ sederajat sebesar 20,73, perguruan tinggi 16,68 persen dan tamat SD/ sederajat sebesar 13,23 persen. Terdapat 4,41 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah bisa jadi memang tidak mengenyam pendidikan atau memang pernah bersekolah di SD/ sederajat namun tidak tamat. Jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 5,74 persen dan penduduk laki-laki sebesar 3,07 persen. Namun persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SD/ sederajat 15,48 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 10,96 persen, dan SMP/ sederajat sebesar 20,81 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 20,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan relatif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pencapaian pendidikan lanjutan dibandingkan laki-laki. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat, persentase laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yakni sebesar 39,40 persen, sedangkan perempuan sebesar 33,42 persen.

BAB V
KARTU JAKARTA PINTAR SEBAGAI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DI DKI JAKARTA

5.1 Pengertian Kartu Jakarta Pintar

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program pemerintah DKI Jakarta yang memberikan akses pendidikan dan nutrisi kepada warga khususnya dari kalangan tidak mampu hingga dapat menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SMA/SMK dengan Dana program KJP berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi program unggulan Gubernur Jokowi (sekarang Presiden RI) dan sekaligus ikon baru strategi pembangunan Jakarta yang berpihak pada warga marjinal ibukota. Sasaran penerima program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah pemberian bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan kartu.

Program ini khusus diperuntukkan bagi anak usia sekolah SD hingga SMA atau yang sederajat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dikatakan kurang mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

Peserta didik sebagai calon penerima KJP antara lain :

1. Peserta didik warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di DKI Jakarta.

2. Peserta didik warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di luar DKI Jakarta (sekolah di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan tidak kos/ngelaju).
3. Peserta didik warga luar DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di DKI Jakarta.

5.2 Besaran Dana Yang Diterima

Kepada peserta didik yang menerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berhak menerima bantuan. Besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik per bulan ditampilkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. Besarnya Dana Biaya Operasional Pendidikan Untuk Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, di DKI Jakarta (Rupiah)

Jenjang Pendidikan	Biaya Personal Pendidikan/Bulan/Peserta Didik			
	Sekolah Negeri		Sekolah Swasta	
	Dana KJP	Dana KJP	SPP	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD sederajat	250.000	250.000	130.000	380.000
SMP Sederajat	300.000	300.000	170.000	470.000
SMA sederajat	420.000	420.000	275.000	695.000
SMK Sederajat	450.000	450.000	240.000	690.000
PKBM	300.000	300.000	-	300.000

Sumber : Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Tabel 11. menunjukkan bahwa pada sekolah negeri hanya menerima biaya operasional pendidikan berupa dana KJP saja, tetapi pada sekolah swasta menerima bantuan berupa dana KJP dan SPP. Peserta didik pada sekolah negeri tidak mendapatkan bantuan untuk sumbangan pembangunan pendidikan karena sudah digratiskan oleh

pemerintah. Besarnya dana KJP pada sekolah negeri dan swasta relatif sama, yaitu Rp 250.000 untuk SD dan sederajat, Rp 300.000 untuk SMP sederajat, Rp 420.000 untuk SMA negeri dan Rp 450.000 untuk SMA swasta. Disamping jenjang pendidikan formal baik negeri maupun swasta, terdapat dana KJP yang diberikan kepada peserta didik yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang diberikan dana KJP sebesar Rp 300.000 per siswa per bulan.

5.3 Perkembangan Penerima Kartu Jakarta Pintar

Pada tahun 2014 jumlah peserta didik atau siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar mencapai 573.089 orang siswa yang terdiri dari 422.548 orang atau 73,70 persen berasal dari sekolah negeri, dan sisanya sebanyak 150.541 orang atau 26,30 persen berasal dari sekolah swasta. Pada tahun 2015 jumlah siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar menjadi sebanyak 561.408 siswa, pada tahun 2016 sebanyak 531.007 siswa, tahun 2017 sebanyak 792.495, tahun 2018 sebanyak 805.015 dan tahun 2019 menjadi 860.397.

Tabel 12. Perkembangan Penerima Kartu Jakarta Pintar Menurut Status Sekolah di DKI Jakarta, 2014-2018

Tahun	Negeri		Swata		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	422.548	73,70	150.541	26,30	573.089	100,00
2015	328.183	58,50	233.225	41,50	561.408	100,00
2016	310.118	58,30	220.889	41,70	531.007	100,00
2017	474.705	59,90	317.790	40,10	792.495	100,00
2018	482.204	59,90	322.811	40,10	805.015	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Lebih dari separo jumlah siswa penerima KJP adalah siswa yang berasal dari sekolah negeri. Pada tahun 2014 jumlah siswa penerima KJP dari sekolah negeri mencapai 73,70

persen dan sisanya 26,30 persen dari sekolah swasta. Pada tahun 2015 dan 2016 proporsi penerima KJP sekolah negeri dan swasta masing-masing sebesar 58,50 persen dan 58,30 persen. Pada tahun 2017 dan 2018 proporsi penerima KJP sekolah negeri dan swasta masing-masing sebesar 59,90 persen dan 40,10 persen. Di masa yang akan datang diharapkan dapat terjadi keseimbangan penerima KJP baik dari sekolah negeri maupun swasta.

Tabel 13. Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di DKI Jakarta, 2016

Tahun	Negeri		Swata		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	223.776	72,16	28.453	12,88	252.229	47,50
SMP	57.670	18,60	48.375	21,90	106.045	19,97
SMA	7.818	2,52	9.844	4,46	17.662	3,33
SMK	12.446	4,01	67.764	30,68	80.210	15,11
MI	1.907	0,61	44.500	20,15	46.407	8,74
MTs	4.456	1,44	19.196	8,69	23.652	4,45
MA	1.857	0,60	2.381	1,08	4.238	0,80
PKBM A	70	0,02	178	0,08	248	0,05
PKBM B	43	0,01	44	0,02	87	0,02
PKBM C	75	0,02	154	0,07	229	0,04
Jumlah	310.118	100,00	220.889	100,00	531.007	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Pada tahun 2016 dari 310.118 siswa atau peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar pada sekolah negeri, sekitar 72,16 persen bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan 18,60 persennya bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dapat dikatakan sebanyak 90,76 persen siswa sekolah negeri penerima KJP adalah siswa pada jenjang

pendidikan SD dan SMP. Sisanya sebanyak 9,24 persen penerima adalah siswa sekolah negeri pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) sebesar 6,53 persen, sekolah berbasis agama (MI, MTs, dan MA) negeri sebesar 2,65 persen, serta PKBM negeri (0,05 persen).

Jumlah siswa penerima KJP pada sekolah swasta untuk pendidikan SD dan SMP mencapai 34,78 persen, tidak jauh berbeda dengan jumlah siswa yang bersekolah pada SMA dan SMK sebesar 35,14 persen. Jumlah siswa pada sekolah berbasis agama (MI, MTs, dan MA) swasta mencapai 29,92 persen, yang didominasi oleh MI mencapai 20,15 persen. Siswa PKBM swasta penerima KJP hanya sebanyak 0,17 persen.

Secara keseluruhan tampak bahwa penerima KJP pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta untuk sekolah SD dan sederajat mencapai 56,24 persen, SMP dan sederajat mencapai 24,42 persen, SMA dan sederajat mencapai 19,24 persen, dan siswa PKBM mencapai 0,11 persen.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi DKI Jakarta guna penyusunan rencana pembangunan di bidang pendidikan ke depan, yaitu :

1. Pada tahun 2018, persentase anak usia 0-10 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak dan Bustanul Athfal sebesar 54,72 persen, yang pernah/sedang mengikuti pendidikan di Paud sebesar 40,59 persen, di jenjang kelompok bermain sebesar 3,54 persen, dan 1,15 persen di penitipan anak. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu.
2. Angka Partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/ sederajat sebesar 36,40 persen, diikuti tamat SMP/sederajat sebesar 20,73 dan tamat SD/sederajat sebesar 13,23 persen, sedangkan presentase penduduk yang tamat PT sebesar 16,68 persen.
4. Bantuan biaya operasional pendidikan melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditujukan kepada para peserta didik dari kalangan masyarakat tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2017. *Potret Pendidikan Indonesia. Statistik Pendidikan 2016*. Jakarta
- BPS. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2017*.
- BPS. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2016*.
- BPS. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2017*.
- BPS. 2018. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2018*.
- Data Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dalam disdik.jakarta.go.id.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru.
- Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan Salemba Tengah No. 36-38, Senen, Jakarta Pusat
Telp. 021 31928493; email : bps3100@bps.go.id;
website : www.jakarta.bps.go.id

ISBN 978-602-0922-34-8

